



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KARMIN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 60753

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.719.170.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/234 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/78 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 176.970.000
3. Tanah Seluas 909 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 949 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 284.700.000
5. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 232.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **179.200.000**

1. MOTOR, HONDA NF 100 SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA G Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
5. MOTOR, HONDA E1F02N1M2 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000



6. MOTOR, YAMAHA BEJ A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
25.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 83.705.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 146.191.156

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.128.266.156

III. HUTANG Rp. 156.720.312

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.971.545.844

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.